

PENGELOLAAN PROGRAM AIR BERSIH HIPPAM PADA BUMDES CIPTA MANDIRI DI DESA KAJEKSAN KECAMATAN TULANGAN

Eliza Rahma Andini¹, Isnaini Rodiyah²

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Email Korespondensi: isnainirodiyah@umsida.ac.id

Email: elizarachmaa@gmail.com

ABSTRACT

The study examines the management of the HIPPAM clean water program administered by BUMDes Cipta Mandiri in Kajeksan Village, Tulangan District, Sidoarjo Regency, by applying George R. Terry's management functions, namely planning, organizing, actuating, and controlling, as the analytical framework. A qualitative research design with a descriptive approach was employed. Data were collected through observations, semi-structured interviews, and document analysis, and subsequently analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, which consists of data reduction, data display, and conclusion drawing and verification. The findings reveal that the management of the HIPPAM program has generally been implemented effectively through participatory planning, a clearly defined organizational structure, routine operation of water distribution services, and periodic monitoring and evaluation. The program has improved community access to clean water while contributing to an increase in Village Original Revenue (PADes). Nevertheless, several managerial challenges remain, including limited human resource capacity, the absence of comprehensive standard operating procedures and systematic administrative documentation, and inadequate operational infrastructure. These limitations affect the efficiency and consistency of program implementation. Therefore, strengthening institutional governance, enhancing the managerial capacity of HIPPAM administrators, and improving operational support systems are recommended to ensure the effectiveness, accountability, and long-term sustainability of clean water services.

Keywords: BUMDes, HIPPAM, Clean water management, Management functions.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan program air bersih HIPPAM yang diselenggarakan oleh BUMDes Cipta Mandiri di Desa Kajeksan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan fungsi manajemen George R. Terry, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sebagai landasan analisis. Penelitian menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan program HIPPAM telah berjalan secara efektif yang ditunjukkan oleh perencanaan yang melibatkan masyarakat, pembagian tugas organisasi yang jelas, pelaksanaan distribusi air bersih secara berkesinambungan, serta kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara rutin. Program tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan akses masyarakat terhadap layanan air bersih sekaligus mendukung peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Di sisi lain, pengelolaan program masih menghadapi beberapa kendala, meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, belum optimalnya penerapan standar operasional prosedur (SOP), dokumentasi administrasi yang belum tertata dengan baik, serta keterbatasan sarana operasional. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan tata kelola kelembagaan, pengembangan kapasitas pengelola HIPPAM, serta peningkatan dukungan operasional agar layanan air bersih dapat diselenggarakan secara lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kata kunci: BUMDes, HIPPAM, Pengelolaan air bersih, Fungsi manajemen.

PENDAHULUAN

Desa merupakan entitas pemerintahan tingkat lokal yang memegang peranan penting dalam mendukung pembangunan nasional dari bawah sebagai bagian dari sistem desentralisasi di Indonesia. Dalam proses pembangunan, desa tidak hanya dipandang sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai pelaku utama pembangunan yang berlandaskan pada kearifan lokal dan partisipasi masyarakat. Setiap desa memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik dari segi geografis, sosial, budaya, maupun ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan desa harus disesuaikan dengan kondisi tersebut guna mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Syamsuddin et al., 2025)

Salah satu kebijakan strategis pemerintah yang mendorong penguatan kapasitas ekonomi desa adalah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan kepada desa untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai entitas ekonomi desa. BUMDes berfungsi sebagai instrumen penggerak ekonomi lokal yang dikelola secara partisipatif oleh pemerintah desa dan masyarakat (Khoirul, 2024). Pembentukan BUMDes bertujuan untuk mengembangkan berbagai kegiatan usaha yang sesuai dengan potensi desa, mendukung program pemerintah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi lokal. Selain itu, keberadaan BUMDes juga menjadi salah satu upaya strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta mendorong kemandirian ekonomi pedesaan (Susanti, 2024).

Sebagai lembaga ekonomi desa, BUMDes memiliki peran strategis tidak hanya dalam pengembangan usaha dan ekonomi lokal, tetapi juga dalam penyediaan layanan publik, seperti layanan air bersih. Pengelolaan unit usaha tersebut menunjukkan bahwa BUMDes memiliki kontribusi dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan desa (Agustri Hestiana et al., 2024).

Salah satu bentuk pelayanan publik yang dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah penyediaan layanan air bersih melalui Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM). HIPPAM merupakan kelembagaan berbasis masyarakat yang dibentuk untuk mengelola sistem penyediaan air minum secara mandiri, mulai dari pengelolaan sumber air, pengoperasian sarana dan prasarana, hingga pendistribusian air kepada masyarakat. Kehadiran HIPPAM bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap air bersih sekaligus mendorong keterlibatan warga dalam pengelolaan layanan publik di tingkat desa. Di Provinsi Jawa Timur, keberadaan HIPPAM telah dikenal sejak diterbitkannya Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1989 tentang Pembentukan Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM). Dalam perkembangannya, HIPPAM tidak hanya berfungsi sebagai pengelola layanan air bersih berbasis masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu unit layanan yang dapat dikelola oleh BUMDes untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik serta memperkuat kemandirian ekonomi desa. Untuk memberikan gambaran perkembangan BUMDes di Indonesia, berikut disajikan data lima provinsi dengan jumlah BUMDes terbanyak di Indonesia pada tahun 2024.

Tabel 1: Provinsi dengan Jumlah BUMDES Terbanyak Tahun 2024

No.	Provinsi	Jumlah Unit Usaha BUMDes
1.	Jawa Tengah	6.695
2.	Jawa Timur	2.863
3.	Jawa Barat	2.690
4.	Lampung	2.433
5.	Aceh	1.658

Sumber: Diolah dari Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 177 Tahun 2024 tentang Hasil Pemeringkatan BUMDes

Berdasarkan data hasil pemeringkatan BUMDesa atau BUMDesa Bersama secara nasional tahun 2024. Provinsi Jawa Tengah menempati peringkat tertinggi dengan jumlah BUM Desa sebanyak 6.695 unit. Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat juga menunjukkan jumlah yang cukup besar dengan masing-masing sebanyak 2.863 dan 2.690 unit. Sementara itu, Provinsi Lampung dan Aceh termasuk dalam lima

besar provinsi dengan jumlah BUMDesa terbanyak di Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwa pengembangan BUMDesa telah menjadi salah satu strategi penting dalam mendorong kemandirian ekonomi desa serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat di berbagai daerah. Salah satu provinsi yang menunjukkan perkembangan signifikan adalah Jawa Timur yang menempati posisi kedua secara nasional. Kondisi tersebut menunjukkan berkembangnya pengelolaan BUMDes di berbagai desa di Jawa Timur, termasuk Desa Kajeksan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo.

Salah satu desa yang turut memaksimalkan keberadaan BUMDes adalah Desa Kajeksan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. BUMDes di desa tersebut bernama “Cipta Mandiri” dan mengelola beberapa unit usaha desa, salah satunya layanan air bersih HIPPAM yang menjadi fokus penelitian ini. Pemilihan unit usaha HIPPAM sebagai objek penelitian didasarkan pada kondisi masyarakat Desa Kajeksan yang sebelumnya mengalami kesulitan memperoleh air layak konsumsi. Keberadaan HIPPAM memberikan kontribusi strategis terhadap penyediaan air bersih bagi masyarakat serta peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Program HIPPAM di Desa Kajeksan dikelola oleh BUMDes Cipta Mandiri sebagai layanan penyediaan air bersih berbasis masyarakat yang bertujuan meningkatkan akses air layak konsumsi bagi masyarakat desa. Untuk memberikan gambaran perkembangan layanan HIPPAM, berikut disajikan data perkembangan layanan HIPPAM BUMDes Cipta Mandiri Tahun 2023–2025.

Tabel 2: Perkembangan Layanan HIPPAM BUMDes Cipta Mandiri Tahun 2023-2025

No	Komponen	2023	2024	2025
1.	Rumah Tangga Terlayani	209	220	230
2.	Kapasitas Produksi Air	24.000 liter	24.000 liter	24.000 liter
3.	Pendapatan per Tahun	Rp3.900.000	Rp4.100.000	Rp4.300.000
4.	Kontribusi terhadap PADes	15%	15%	15%

Sumber: Wawancara Ketua Operasional HIPPAM (2025)

Berdasarkan data tersebut, jumlah pelanggan dan pendapatan layanan HIPPAM mengalami peningkatan dari tahun 2023 hingga 2025. Jumlah rumah tangga terlayani meningkat dari 209 pada tahun 2023 menjadi 230 pada tahun 2025. Jika dibandingkan, indikator jumlah pelanggan dan pendapatan menunjukkan tren naik secara konsisten dari tahun 2023, 2024, hingga 2025. Sebaliknya, kapasitas produksi air tetap tidak mengalami kenaikan, yang berarti belum ada penambahan infrastruktur baru. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan layanan air bersih di Desa Kajeksan terus berkembang, tetapi masih menghadapi berbagai kendala dalam mendukung keberlanjutan program secara optimal.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pengelolaan maupun implementasi program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari berbagai perspektif. Penelitian (Arina Faiqotunnisa et al., 2024) menunjukkan bahwa implementasi program air bersih yang dikelola BUMDes telah berjalan dengan baik apabila didukung oleh komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi yang memadai, meskipun masih ditemukan kendala berupa tunggakan pembayaran pelanggan, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas, serta kerusakan sarana operasional yang menghambat pengembangan program. Selanjutnya, penelitian (Winarno et al., 2025) menunjukkan bahwa pengelolaan layanan air minum berbasis BUMDes berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan dasar serta mendukung peningkatan kesehatan masyarakat melalui penyediaan akses air bersih yang berkelanjutan. Penelitian (Linda Machmudah & Isnaini Rodiyah, 2024) juga menunjukkan bahwa implementasi program pengembangan usaha BUMDes masih menghadapi berbagai kendala berupa komunikasi yang belum optimal, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat, serta struktur organisasi yang belum berjalan secara efektif sehingga memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program. Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa kajian terdahulu lebih berorientasi pada implementasi kebijakan maupun faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program BUMDes. Belum banyak penelitian yang secara khusus menganalisis pengelolaan Program Air Bersih

HIPPAM berdasarkan fungsi-fungsi manajemen organisasi yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dengan menggunakan teori fungsi manajemen George R. Terry untuk menganalisis pengelolaan Program Air Bersih HIPPAM pada BUMDes Cipta Mandiri, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai proses pengelolaan layanan air bersih serta menghasilkan rekomendasi bagi penguatan tata kelola BUMDes dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

Penelitian ini menjadi penting mengingat penyediaan air bersih merupakan salah satu bentuk pelayanan publik dasar yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebagai salah satu unit usaha BUMDes, HIPPAM tidak hanya berfungsi memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses air bersih yang layak, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Pengelolaan program yang belum optimal berpotensi menurunkan kualitas pelayanan, menghambat keberlanjutan penyediaan air bersih, serta mengurangi kontribusi ekonomi bagi desa. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai pengelolaan Program Air Bersih HIPPAM berdasarkan fungsi manajemen agar dapat memberikan rekomendasi bagi penguatan kelembagaan BUMDes, peningkatan efektivitas pelayanan publik, serta keberlanjutan pengelolaan air bersih di Desa Kajeksan.

Dalam menganalisis pengelolaan Program Air Bersih HIPPAM tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif fungsi manajemen sebagai landasan analisis. Pengelolaan program layanan publik seperti air bersih oleh BUMDes memerlukan penerapan fungsi manajemen yang terstruktur agar tujuan pembangunan desa dapat tercapai secara optimal. George R. Terry dalam Manullang (2010) mengemukakan bahwa fungsi manajemen mencakup perencanaan (*planning*) sebagai proses menetapkan tujuan dan langkah strategis, pengorganisasian (*organizing*) untuk membagi tugas dan sumber daya secara tepat, pelaksanaan (*actuating*) untuk menggerakkan seluruh elemen organisasi, dan pengawasan (*controlling*) guna memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana serta melakukan evaluasi. Keempat fungsi ini menjadi kerangka analisis yang relevan untuk menilai sejauh mana BUMDes Cipta Mandiri mengelola program HIPPAM secara efektif dalam rangka meningkatkan akses air bersih dan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Kajeksan.

Berdasarkan observasi dilapangan terdapat beberapa masalah dalam pengelolaan program HIPPAM di Desa Kajeksan yaitu: Pertama, terbatasnya sumber daya manusia masih menjadi kendala karena hanya terdapat dua teknisi sosial yang menangani berbagai pekerjaan teknis. Kondisi ini menyebabkan pembagian tugas tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, sehingga beban kerja menjadi berat pada beberapa orang saja dan tidak terbagi secara seimbang. Hal tersebut juga menimbulkan potensi keterlambatan dalam penanganan masalah teknis yang muncul di lapangan. Kedua, meskipun kegiatan monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara rutin, masih sering terjadi kebocoran pipa maupun kerusakan pompa secara berulang. Permasalahan ini tidak hanya menambah biaya perawatan, tetapi juga menghambat kelancaran distribusi air bersih ke masyarakat.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengelolaan program air bersih HIPPAM oleh BUMDes Cipta Mandiri di Desa Kajeksan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, dengan menggunakan fungsi manajemen George R. Terry sebagai kerangka analisis, meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman mengenai efektivitas pengelolaan, kendala yang dihadapi, serta langkah strategis yang diperlukan untuk meningkatkan keberlanjutan layanan air bersih dan kontribusinya terhadap pembangunan di desa Kajeksan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang berlokasi di Desa Kajeksan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Fokus penelitian adalah pengelolaan Program Air Bersih HIPPAM pada BUMDes Cipta Mandiri berdasarkan fungsi manajemen George R. Terry yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

(*controlling*). Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling (Bambang Arianto & Rani, 2024), yang terdiri atas Ketua Operasional dan Teknisi HIPPAM sebagai informan kunci, serta masyarakat pengguna layanan air bersih di Dusun Kajeksan dan Dusun Godekan sebagai informan pendukung. Data penelitian meliputi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara semi-terstruktur, serta data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi pemerintah desa, arsip BUMDes, laporan tahunan HIPPAM, dan dokumentasi terkait. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi yang disusun sesuai dengan fokus penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Yuliani, 2018). Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Muslimah, 2021) untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pengelolaan Program Air Bersih HIPPAM pada BUMDes Cipta Mandiri.

PEMBAHASAN

Pengelolaan merupakan proses untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien melalui penerapan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Menurut George R. Terry dalam (Pratama et al., 2020) keempat fungsi tersebut saling berkaitan dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Penerapan fungsi-fungsi tersebut juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan program berbasis masyarakat, termasuk layanan penyediaan air bersih (Maharani et al., 2025). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan fungsi manajemen George R. Terry sebagai kerangka analisis untuk mengkaji pengelolaan program air bersih HIPPAM oleh BUMDes Cipta Mandiri di Desa Kajeksan, yang meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan proses awal dalam manajemen yang berperan untuk menentukan arah dan tujuan organisasi agar setiap kegiatan berlangsung secara efektif dan efisien. George R. Terry dalam (Dimas Erlangga & Syahid, 2023) menegaskan bahwa perencanaan adalah proses menetapkan tujuan serta merumuskan langkah strategis yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam konteks penyediaan layanan air bersih oleh BUMDes Cipta Mandiri, fungsi perencanaan berperan penting untuk memastikan program HIPPAM dapat berkembang secara berkelanjutan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat desa yang terus meningkat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan program HIPPAM dilakukan melalui musyawarah desa dan koordinasi bersama pemerintah desa serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sidoarjo. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa setiap rencana pengembangan layanan air bersih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi teknis di lapangan. Hasil wawancara dengan Bapak Munif selaku Ketua Operasional HIPPAM menjelaskan:

“Setiap rencana pengembangan HIPPAM selalu kami bahas bersama dengan pemerintah desa melalui forum musyawarah atau koordinasi bersama, sehingga setiap keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan apa kebutuhan dan keinginan masyarakat. Selain itu, perencanaan juga disesuaikan dengan kemampuan jaringan yang kita miliki, contohnya seperti kondisi infrastruktur yang ada, serta kondisi teknis di lapangan bagaimana, apakah mendukung atau tidak agar pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan” (Wawancara, 2025).

Hasil temuan menunjukkan bahwa perencanaan tidak disusun secara sepihak, melainkan melibatkan berbagai pihak agar rencana yang dibuat lebih realistis dan dapat dilaksanakan sesuai kapasitas pengelolaan yang ada (Radyan et al., 2021). Pola ini mencerminkan prinsip perencanaan partisipatif, di mana masyarakat dan pemerintah desa terlibat langsung dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan air bersih. (Gunawan Widjaja, 2025) menegaskan bahwa “keberhasilan program berbasis masyarakat sangat dipengaruhi oleh keterlibatan warga dan koordinasi lintas lembaga yang konsisten”. Temuan tersebut juga tercermin dalam

praktik perencanaan HIPPAM yang melibatkan anggota BUMDes, pemerintah desa, masyarakat, serta petugas teknis dari kabupaten. Secara umum, arah kebijakan perencanaan BUMDes Cipta Mandiri dalam mengelola HIPPAM terbagi ke dalam tiga fokus utama sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3: Fokus Perencanaan HIPPAM BUMDes Cipta Mandiri Tahun 2023-2025

Tahun	Fokus	Target	Keterangan
2023	Konsolidasi kelembagaan	Pengelolaan HIPPAM lebih tertata	Penguatan struktur dan manajemen internal
2024	Perluasan layanan	Penambahan jumlah warga terlayani	Perluasan jaringan air ke dusun-dusun
2025	Optimalisasi cakupan	Aliran air lebih stabil dan merata	Peningkatan kapasitas distribusi air

Sumber: Wawancara dengan Ketua Operasional HIPPAM (2025)

Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui bahwa perencanaan kerja HIPPAM BUMDes Cipta Mandiri dilakukan secara bertahap dari tahun 2023 hingga 2025 dengan fokus, target, dan arah kegiatan yang berbeda pada setiap tahunnya. Pada tahun 2023, perencanaan difokuskan pada konsolidasi kelembagaan dengan target pengelolaan HIPPAM yang lebih tertata. Fokus ini diwujudkan melalui penguatan struktur organisasi dan manajemen internal. Pada tahap ini, pengurus menetapkan struktur organisasi, membagi tugas teknis dan petugas lapangan, serta mulai menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan dan perawatan jaringan air bersih agar operasional lebih terorganisir.

Selanjutnya, pada tahun 2024, perencanaan diarahkan pada perluasan wilayah layanan melalui pengembangan jaringan pipa ke Dusun Godekan dengan dukungan program PAMSIMAS. Tahap ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah rumah tangga yang terlayani sekaligus mendorong pemerataan akses air bersih di wilayah desa. Dalam pelaksanaannya, BUMDes melakukan koordinasi teknis dengan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sidoarjo guna memastikan kesesuaian standar pembangunan serta kelayakan infrastruktur yang digunakan. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat calon penerima manfaat juga dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai mekanisme pembayaran dan distribusi sistem distribusi layanan. Pada tahun 2025, perencanaan difokuskan pada optimalisasi cakupan layanan untuk menjangkau seluruh masyarakat Desa Kajeksan. BUMDes menargetkan perbaikan jaringan pipa yang sering mengalami kebocoran, peningkatan kapasitas distribusi air, serta penguatan sistem kelistrikan pompa agar aliran air tetap stabil. Hasil wawancara dengan Bapak Munif selaku Ketua Operasional HIPPAM menjelaskan lebih lanjut tentang situasi ini:

“Kalau pelanggannya terus bertambah, tentu beban distribusi dan kapasitas jaringan pipa juga ikut meningkat. Kondisi ini membuat kami harus lebih sering melakukan pengecekan pipa di beberapa titik. Hal ini penting dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan seperti aliran air yang macet, tekanan air yang tiba-tiba melemah, dan lain-lain. Dengan begitu distribusi air dapat tetap berjalan dengan lancar” (Wawancara, 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perencanaan teknis dalam pengelolaan HIPPAM bersifat dinamis dan harus menyesuaikan dengan kondisi riil di lapangan, khususnya terkait peningkatan jumlah pelanggan yang berdampak pada beban distribusi dan kapasitas jaringan pipa. Kondisi ini menuntut dilakukannya pengecekan dan pemeliharaan secara rutin pada beberapa titik jaringan guna mengantisipasi gangguan distribusi air agar tetap berjalan lancar. Namun demikian, perencanaan tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis, tetapi juga oleh kesiapan pendanaan BUMDes. Beberapa rencana pengadaan alat dan perbaikan jaringan perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa serta kontribusi PADes, sehingga tidak seluruh rencana dapat direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Kondisi ini sejalan dengan pandangan (Gani, 2025) yang menyatakan bahwa keterbatasan sumber pembiayaan sering menjadi kendala utama dalam implementasi perencanaan BUMDes di tingkat desa.

Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa perencanaan HIPPAM belum sepenuhnya didukung oleh dokumen perencanaan teknis tertulis yang rinci, sehingga beberapa keputusan masih banyak bergantung pada

pengalaman dan pertimbangan langsung pengurus di lapangan. Ketua Operasional HIPPAM menyampaikan bahwa perencanaan selama ini lebih banyak disepakati secara lisan dalam forum musyawarah, sementara dokumen tertulis baru dibuat secara sederhana sebagai laporan tahunan. Kondisi ini membuat perencanaan bersifat fleksibel dan mudah disesuaikan dengan kondisi lapangan, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan ketika terjadi pergantian pengurus atau teknisi. Oleh karena itu, perencanaan HIPPAM ke depan perlu diarahkan juga pada penguatan dokumen perencanaan teknis agar menjadi pedoman kerja yang lebih jelas dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi perencanaan dalam pengelolaan HIPPAM oleh BUMDes Cipta Mandiri telah berjalan secara partisipatif dan bertahap sesuai kebutuhan masyarakat. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam aspek pendalaman perencanaan teknis serta penyusunan dokumen perencanaan yang lebih sistematis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan penyempurnaan perencanaan teknis agar keberlanjutan layanan air bersih di Desa Kajeksan dapat terjaga dengan lebih baik. Temuan ini sejalan dengan teori George R. Terry mengenai fungsi perencanaan (*planning*), karena pengelola telah menetapkan tujuan, menyusun arah pengembangan program, dan melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan. Namun, fungsi perencanaan belum terlaksana secara maksimal karena beberapa program masih menyesuaikan kondisi keuangan dan kebutuhan teknis di lapangan.

Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk mengatur pembagian tugas, menetapkan tanggung jawab, serta menyusun hubungan kerja antarindividu agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif. Terry (2010) menjelaskan bahwa pengorganisasian mencakup proses pengelompokan orang, alat, dan tugas agar seluruh komponen organisasi dapat bekerja sesuai peran dan fungsi masing-masing. Dalam konteks HIPPAM Cipta Mandiri, prinsip ini diterapkan melalui pembentukan struktur organisasi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Kajeksan Tahun 2021, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4: Struktur Organisasi HIPPAM

Jabatan	Tugas Pokok
Direktur	Mengkoordinasikan dan menetapkan kebijakan pengelolaan BUMDes dan HIPPAM
Kepala Operasional	Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan teknis
Manajer	Mengatur operasional dan pelayanan pelanggan
Bendahara	Mengelola administrasi keuangan
Sekretaris	Mengelola administrasi kegiatan

Sumber: Surat Keputusan Kepala Desa Kajeksan Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 4, dapat diketahui bahwa pengelolaan HIPPAM Cipta Mandiri telah dilengkapi dengan struktur organisasi yang secara formal menetapkan pembagian peran dan tanggung jawab setiap unsur pengelola. Struktur tersebut secara formal sudah mencerminkan penerapan *division of work* sebagaimana ditegaskan oleh Terry, yaitu adanya pembagian kerja yang jelas untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan layanan (Loso Judijanto, S.Si., M.M. et al., 2024). Namun demikian, temuan di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas pengorganisasian belum sepenuhnya berjalan optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suntoro selaku teknisi HIPPAM, menjelaskan:

“Terkadang dalam satu hari itu kami bisa menghadapi banyak pengaduan dan laporan seperti pompa yang rusak, mengecek panel, dan memperbaiki pipa yang bocor, tapi karena teknisinya hanya dua orang, tidak semua pekerjaan bisa dikerjakan bersamaan dan kadang harus diprioritaskan mana yang paling mendesak terlebih dahulu, jadi untuk pekerjaan yang lain harus menunggu giliran, dan kalau semua laporan harus ditangani di hari itu juga jujur saya merasa tugas ini agak cukup berat karena

kurangnya anggota” (Wawancara, 2025).

Hasil temuan menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah tenaga teknis menyebabkan pembagian kerja belum berjalan secara seimbang. Kondisi ini mengindikasikan bahwa terjadi gap antara konsep pembagian kerja yang efektif dengan realitas di lapangan, efektivitas pelaksanaan tugas belum sepenuhnya optimal karena dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia. Kondisi ini meningkatkan potensi keterlambatan dalam penanganan gangguan teknis, terutama ketika kerusakan terjadi secara bersamaan di beberapa titik jaringan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian (Ajie & Isnawaty, 2024) dalam Jurnal Tata Kelola Pemerintahan Desa yang menyebutkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor utama ketidakefektifan organisasi desa, khususnya pada unit usaha yang memiliki kompleksitas teknis tinggi seperti layanan air bersih.

Selain persoalan teknis, pengorganisasian juga menghadapi kendala pada aspek administrasi. Hasil temuan menunjukkan bahwa sebagian pekerjaan pencatatan pelanggan dan pengelolaan keuangan masih dibantu oleh staf BUMDes karena belum adanya pemisahan fungsi administrasi yang jelas. Akibatnya, petugas administrasi harus menangani dua tanggung jawab sekaligus, yaitu pencatatan meter air dan penagihan pembayaran, yang berpotensi menimbulkan kelelahan kerja serta kesalahan pencatatan seiring bertambahnya jumlah pelanggan.

Dari sisi koordinasi internal, struktur organisasi HIPPAM sebenarnya sudah jelas, namun mekanisme koordinasi belum berjalan secara sistematis. Hasil wawancara menunjukkan bahwa komunikasi antartugas sebagian besar dilakukan secara informal melalui pesan singkat atau komunikasi langsung di lapangan, tanpa pencatatan tertulis yang memadai. Kondisi ini menyebabkan beberapa informasi teknis, seperti riwayat kerusakan atau jadwal perawatan, tidak terdokumentasi dengan baik. Hal ini sejalan dengan temuan (Rakmadi & Suryandari, 2025) yang menyatakan bahwa lemahnya sistem koordinasi dan dokumentasi dalam organisasi pelayanan publik desa dapat memicu miskomunikasi dan memperlambat penyelesaian masalah operasional.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengorganisasian HIPPAM oleh BUMDes Cipta Mandiri telah memiliki struktur kelembagaan yang jelas, namun pelaksanaan di lapangan masih dihadapkan pada keterbatasan jumlah tenaga teknis, pembagian kerja yang belum seimbang, serta belum optimalnya koordinasi dan dokumentasi kerja. Kondisi tersebut diperkuat oleh belum tegasnya batas kewenangan operasional dan belum tersusunnya SOP sebagai pedoman kerja baku. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan organisasi melalui penataan ulang pembagian tugas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penyusunan SOP agar pengelolaan air bersih dapat berlangsung secara lebih tertib dan berkelanjutan. Temuan ini sesuai dengan teori George R. Terry mengenai fungsi pengorganisasian (*organizing*), karena telah terdapat pembagian peran dan struktur kerja dalam pengelolaan HIPPAM. Namun, pelaksanaan fungsi tersebut belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia dan koordinasi internal yang masih lemah.

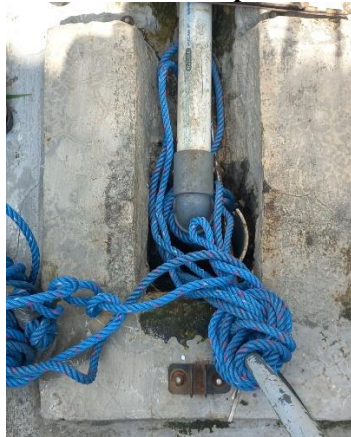
Pelaksanaan (*Actuating*)

George R. Terry (2010) mendefinisikan pelaksanaan (*actuating*) sebagai upaya menggerakkan semua anggota organisasi agar bekerja sesuai rencana melalui komunikasi, motivasi, dan kepemimpinan yang efektif. Pelaksanaan merupakan tahap di mana seluruh rencana dan struktur organisasi yang telah disusun dijalankan untuk mencapai tujuan program. Dalam konteks pengelolaan program air bersih di Desa Kajeksan, tahap pelaksanaan dijalankan oleh BUMDes Cipta Mandiri melalui unit usaha HIPPAM yang menjadi ujung tombak pelayanan air bersih kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Operasional HIPPAM, pelaksanaan operasional HIPPAM meliputi distribusi air dari sumur bor menuju tandon berkapasitas 16.000 liter di Dusun Kajeksan dan 8.000 liter di Dusun Godekan, yang selanjutnya dialirkan melalui jaringan pipa utama sepanjang kurang lebih 1.500 meter ke rumah pelanggan, sedangkan mekanisme pembayaran masih dilakukan secara manual atau tunai kepada petugas lapangan dengan tarif Rp1.500 per meter kubik serta iuran perawatan operasional sebesar

Rp5.000 per bulan. Mekanisme ini dinilai berjalan relatif lancar karena telah dipahami oleh masyarakat dan didukung oleh tingkat kepercayaan yang cukup tinggi terhadap pengelola. Data hasil wawancara dan observasi juga menunjukkan peningkatan jumlah pelanggan dari 209 rumah pada tahun 2023 menjadi 230 rumah pada tahun 2025 dengan total penerima manfaat mencapai 2.332 jiwa, yang mencerminkan bahwa pelaksanaan program berjalan secara konsisten dari tahun ke tahun. Pelaksanaan operasional tersebut didukung oleh kegiatan perawatan rutin terhadap panel dan pompa air sebagai komponen utama sistem distribusi. Berdasarkan observasi lapangan, perawatan dilakukan secara berkala setiap minggu untuk menjaga kestabilan tekanan air dan mencegah terjadinya gangguan layanan. Ketika terjadi kerusakan, teknisi lapangan cenderung langsung melakukan penanganan agar distribusi air dapat segera kembali normal. Adapun kondisi sarana operasional tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1: Pompa sumur



Sumber: Dokumentasi pribadi, 2025

Gambar 2: Panel listrik



Sumber: Dokumentasi pribadi, 2025

Gambar 1 menunjukkan infrastruktur pompa sumur bor yang menjadi komponen utama dalam operasional HIPPAM. Pompa sumur ini berfungsi mengalirkan air dari sumber ke tandon sebelum didistribusikan kepada pelanggan. Keberadaan pompa ini sangat menentukan kelancaran suplai air, sehingga pengoperasiannya dilakukan secara terus-menerus dengan pengawasan teknisi. Pemeliharaan dilakukan melalui pengecekan kondisi mesin dan kinerja pompa untuk memastikan sistem tetap berjalan dengan baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlangsungan layanan sangat dipengaruhi oleh keandalan peralatan serta kesiapan teknisi dalam menjaga operasional sistem.

Selanjutnya, gambar 2 menunjukkan adanya panel listrik yang berfungsi sebagai pengendali utama operasional pompa air dalam sistem distribusi HIPPAM. Panel ini mengatur aliran listrik dan menjaga keamanan pengoperasian pompa agar terhindar dari gangguan teknis seperti korsleting atau lonjakan arus. Berdasarkan observasi dan wawancara dengan teknisi, panel listrik diperiksa secara berkala sebagai bagian dari kegiatan perawatan rutin untuk memastikan pompa dapat bekerja secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi pengadaan alat dan suku cadang menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran pelayanan. Hasil wawancara dengan Bapak Munif selaku Kepala Operasional HIPPAM menunjukkan bahwa kendala utama dalam pelaksanaan operasional berkaitan dengan keterbatasan sarana pendukung perbaikan. Sebagai berikut:

“Setiap kali terjadi gangguan teknis, teknisi selalu berusaha untuk segera melakukan perbaikan agar distribusi air kembali normal, tapi terkadang saat memperbaiki kendala tidak selalu dapat dilakukan dengan cepat apabila peralatan atau suku cadang yang dibutuhkan belum tersedia secara lengkap ataupun banyak yang rusak.” (Wawancara, 2025)

Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan di lapangan tidak hanya ditentukan oleh

kesiapan teknisi, tetapi juga sangat bergantung pada ketersediaan peralatan serta kelancaran koordinasi internal dalam mendukung kegiatan operasional. Dari sisi partisipasi masyarakat, pelaksanaan program HIPPAM menunjukkan tingkat antusiasme yang tinggi. Berdasarkan observasi dan wawancara dengan Ibu Rini selaku warga pengguna layanan, menyatakan bahwa:

“Layanan air dari HIPPAM ini sangat membantu bagi saya, apalagi waktu musim kemarau yang panjang, sudah pasti sumber air lain mulai berkurang dan saya sering kehabisan aliran air di kamar mandi sehingga harus menunggu dahulu jika ingin mandi. Ketersediaan air yang cukup dari HIPPAM ini membuat kebutuhan sehari-hari saya seperti mandi dan mencuci tetap bisa terpenuhi dengan baik. Kalau terjadi kerusakan, biasanya ditangani cukup cepat, karena teknisinya langsung datang ke rumah atau lokasi untuk memperbaikinya.” (Wawancara, 2025).

Hasil temuan menunjukkan bahwa, kecepatan tanggapan pengelola menjadi salah satu alasan masyarakat merasa puas terhadap layanan air bersih yang diberikan oleh BUMDes. Hal ini mendukung temuan (Tamu et al., 2025) bahwa efektivitas pelaksanaan program berbasis masyarakat sangat bergantung pada partisipasi warga dan komunikasi yang terbuka antara pengurus dan penerima manfaat. Tingginya keterlibatan masyarakat tidak hanya meningkatkan keandalan operasional, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial BUMDes sebagai lembaga pelayanan publik di tingkat desa.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program HIPPAM oleh BUMDes Cipta Mandiri telah berjalan dengan baik pada level operasional sehari-hari. Hal ini terlihat dari kelancaran distribusi air, adanya perawatan rutin terhadap fasilitas operasional, serta meningkatnya jumlah pelanggan setiap tahun. Namun, pelaksanaan tersebut masih dibatasi oleh ketersediaan peralatan yang belum memadai, pola kerja yang belum terdokumentasi secara sistematis, serta belum diterapkannya inovasi layanan seperti sistem pembayaran non-tunai atau pencatatan digital. Temuan ini sesuai dengan teori George R. Terry mengenai fungsi pelaksanaan (*actuating*), karena pengelola telah menjalankan kegiatan operasional melalui koordinasi kerja dan tindakan langsung dalam pelayanan masyarakat. Akan tetapi, pelaksanaan fungsi tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh keterbatasan fasilitas dan dukungan operasional yang tersedia.

Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan fungsi penting dalam manajemen untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana, mendeteksi adanya penyimpangan, serta menjadi dasar dalam pengambilan tindakan korektif. Terry dalam (Pratama et al., 2024) menjelaskan bahwa pengawasan (*controlling*) dilakukan melalui proses membandingkan hasil kerja dengan standar yang telah ditetapkan, melakukan evaluasi, serta menetapkan langkah perbaikan agar tujuan organisasi tetap tercapai. Dalam konteks pengelolaan layanan air bersih, fungsi pengawasan memiliki peran krusial karena berkaitan langsung dengan kontinuitas distribusi air dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Bentuk kegiatan pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh pengelola HIPPAM Cipta Mandiri beserta frekuensi dan pihak yang terlibat di dalamnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5: Sistem Pengawasan dan Evaluasi HIPPAM

Kegiatan	Frekuensi	Pelaksana
Pemeriksaan pompa dan panel air	Setiap minggu	Teknisi dan Ketua Operasional
Pembersihan tandon air	Setiap 4 bulan	Petugas dari Dinas Perkim
Evaluasi kinerja dan keuangan	Setiap tahun	Pengurus BUMDes dan Pemdes
Rapat koordinasi	Setiap 3 bulan	Pengurus BUMDes dan perwakilan masyarakat

Sumber: Wawancara dengan Ketua Operasional HIPPAM (2025)

Berdasarkan tabel 5, diketahui bahwa pengawasan program HIPPAM dilakukan melalui kombinasi pengawasan teknis, administratif, dan partisipatif. Pemeriksaan pompa dan panel air dilaksanakan secara rutin setiap minggu oleh teknisi lapangan untuk memastikan sistem distribusi air berfungsi normal, sementara pembersihan tandon dilakukan secara berkala bersama Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sidoarjo guna menjaga kualitas air. Selain itu, evaluasi keuangan tahunan dan rapat koordinasi triwulanan menjadi sarana penting untuk menilai kinerja pengelola serta menampung keluhan dan masukan dari masyarakat

Meskipun kegiatan monitoring telah dilaksanakan secara rutin, efektivitas pengawasan belum sepenuhnya optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebocoran pipa dan kerusakan pompa masih sering terjadi, terutama saat hujan deras, petir, atau kegiatan warga yang tidak sengaja merusak jalur pipa. Kondisi ini menyebabkan gangguan distribusi air dan menambah beban biaya perawatan karena penggantian komponen harus segera dilakukan agar layanan dapat kembali normal. Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Munif selaku Kepala Operasional HIPPAM yang menjelaskan bahwa:

“Kalau dari pengawasan itu biasanya kami lihat dari kondisi pompa sama panel, selalu dicek rutin oleh teknisi untuk memastikan dan mengantisipasi kemungkinan gangguan yang bisa menghambat proses distribusi air supaya layanan tetap berfungsi dengan baik, tapi kalau soal pencatatan kerusakan memang belum tersusun rapi, mungkin kami hanya mengirim informasi melalui WhatsApp saja, karena ketika terjadi masalah biasanya kami langsung melakukan perbaikan saat itu juga supaya air cepat mengalir lagi” (Wawancara, 2025).

Hasil temuan menunjukkan bahwa pengawasan masih bersifat operasional dan jangka pendek, yaitu memastikan air tetap mengalir, sementara aspek pencatatan dan evaluasi teknis jangka panjang belum berjalan optimal. Selain itu, belum tersusunnya pencatatan kerusakan secara sistematis berpotensi menyulitkan dalam melakukan evaluasi berkala, mengidentifikasi pola kerusakan, serta menyusun strategi perbaikan yang lebih efektif di masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam aspek administrasi dan dokumentasi teknis agar proses pengawasan dan kualitas pengelolaan berlangsung secara sistematis dan berkelanjutan.

Kondisi tersebut sejalan dengan temuan (Ajie & Isnawaty, 2024) yang menyebutkan bahwa banyak unit HIPPAM desa mengalami kerusakan teknis berulang akibat lemahnya sistem dokumentasi pengawasan dan keterbatasan sumber daya teknis. Selain itu, juga menegaskan bahwa keberlanjutan layanan air bersih desa sangat bergantung pada dukungan logistik, pencatatan kerusakan yang sistematis, serta kesiapan teknis pengelola dalam mengantisipasi gangguan layanan. Tindakan perbaikan umumnya dilakukan setelah kerusakan terjadi, bukan melalui upaya pencegahan berbasis evaluasi berkala. Selain itu, keterbatasan jumlah SDM teknis sering membuat unit layanan air desa kesulitan menerapkan pengawasan preventif secara menyeluruh, sehingga gangguan teknis menjadi masalah yang berulang.

Selain pengawasan teknis yang dilakukan oleh teknisi lapangan, pengawasan administratif dan kelembagaan juga berperan penting dalam menjaga keberlangsungan layanan HIPPAM. Hasil temuan menunjukkan bahwa evaluasi kinerja dan keuangan dilakukan secara tahunan oleh Direktur BUMDes bersama pemerintah desa, namun proses tersebut lebih bersifat evaluasi umum dan belum dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur. Kondisi ini menyebabkan hasil evaluasi belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan operasional secara sistematis. Padahal, dalam konteks pengawasan, evaluasi berkala seharusnya menjadi instrumen utama untuk mengidentifikasi kelemahan pengelolaan dan menyusun langkah korektif yang berkelanjutan. (Maharani et al., 2025)

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan HIPPAM Cipta Mandiri telah berjalan secara rutin dan berperan menjaga keberlangsungan distribusi air bersih, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Pengawasan cenderung berfokus pada tindakan cepat di lapangan, tetapi belum didukung oleh sistem pencatatan, SOP pengawasan, dan kesiapan logistik yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan melalui penyusunan SOP yang jelas, dokumentasi kerusakan secara sistematis, serta kejelasan kewenangan agar pengelolaan layanan air bersih

dapat berjalan lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan. Temuan ini sesuai dengan teori George R. Terry mengenai fungsi pengawasan (*controlling*), karena pengelola telah melakukan pemeriksaan dan evaluasi untuk menjaga keberlangsungan program. Akan tetapi, fungsi pengawasan belum berjalan secara maksimal karena proses evaluasi dan dokumentasi teknis masih belum dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan program air bersih HIPPAM oleh BUMDes Cipta Mandiri di Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan menunjukkan bahwa aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan telah terlaksana dengan cukup baik dalam mendukung pelayanan air bersih kepada masyarakat. Pengelolaan program dilakukan melalui perencanaan yang partisipatif, pelaksanaan operasional yang berjalan rutin, serta pengawasan yang dilakukan secara berkala. Meskipun demikian penelitian juga menemukan beberapa hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya dokumentasi dan SOP, serta keterbatasan sarana pendukung operasional. Dengan demikian, tujuan penelitian telah tercapai, yaitu mengetahui pengelolaan HIPPAM oleh BUMDes Cipta Mandiri berdasarkan teori manajemen George R. Terry. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, dan pengembangan sistem administrasi serta operasional agar pelayanan air bersih dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan agar BUMDes Cipta Mandiri meningkatkan penguatan kelembagaan melalui penyusunan SOP pengelolaan dan pengawasan yang lebih jelas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan sistem administrasi dan dokumentasi teknis yang lebih terstruktur. Selain itu, diperlukan pengadaan sarana pendukung operasional dan perbaikan jaringan secara bertahap agar pelayanan air bersih dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Bagi peneliti berikutnya, diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai pengelolaan HIPPAM dengan ruang lingkup yang lebih luas, seperti analisis efektivitas pelayanan, kualitas air bersih, tingkat kepuasan masyarakat, maupun strategi pengembangan digitalisasi pelayanan pada unit usaha air bersih desa. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran agar diperoleh hasil penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif terkait pengelolaan layanan air bersih berbasis BUMDes.

REFERENSI

- Agustri Hestiana, Faridah, & Romdana. (2024). Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Desa Gelombang Kecamatan Semidang Alas Maras (Sam) Kabupaten Seluma). *Journal Of Governance And Public Administration (Jogapa)*, 1(2), 133–149.
- Ajie, T. S., & Isnawaty, N. W. (2024). Kinerja Pegawai Kantor Desa Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat (Studi Kasus Desa Bayongbong Kabupaten Garut). *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 7(1), 1–10.
- Arina Faiqotunnisa, Chamid Sutikno, Indah Ayu Permana Pribadi, A. A., & Dian Nastiti. (2024). Implementasi Program Air Bersih Badan Usaha Milik Desa Sumber Sari Di Desa Kalisari Kabupaten Banyumas. *Jurnal Inovasi Daerah*, 03(02), 166–176. <https://doi.org/10.566655/Jid.V3i2.226>
- Bambang Arianto, & Rani. (2024). *Teknik Wawancara Dalam Metoda Penelitian Kualitatif*.
- Dimas Erlangga, A. C., & Syahid, A. (2023). *Implementasi Konsep Planning, Organizing, Actuating, Controlling Dalam Pengelolaan Program Kursus Mengemudi*. 8(1), 59–68.
- Gani, M. O. H. A. (2025). Kontribusi Bumdes Dalam Pemberdayaan Ekonomi Dan Kemandirian Desa : Studi Kasus Kecamatan Banyuputih , Kabupaten Situbondo. *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan*, 7(1), 1–9.

- Gunawan Widjaja, H. D. (2025). Inter-Governmental Coordination And The Effectiveness Of Welfare. *Sibatik Journal*, 4(7), 1323–1332.
- Khoirul, K. M. R. S. M. I. M. (2024). Peningkatan Kapasitas Pengelola Bumdes Dalam Mengembangkan Produk Unggulan Desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (Jpmi)*, 4(1), 115–121.
- Linda Machmudah, & Isnaini Rodiyah. (2024). Analysis Of Bumdes Business Development Program Implementation For Village Prosperity. *Indonesian Journal Of Cultural And Community Development*, 15(3), 1–19.
- Loso Judijanto, S.Si., M.M., M. S., Hildawati, S.Sos., M. S., Dr. Narulita Syarweny, Se., Me., Cphcm., Cphrm., Chrbp., Cp., Riani Prihatini Ishak, S.Pi., M. ., & Heirunissa, S.Si., M. . (2024). *Asas-Asas Manajemen (Konsep, Prinsip, Dan Model Manajemen Secara Universal Dalam Mengelola Organisasi Era Digital)*.
- Maharani, R., Firman, & Neviyarni. (2025). Model Manajemen Poac Dalam Layanan Bimbingan Dan Konseling : Tinjauan Sistematis Terhadap Efektivitas Implementasi Di Sekolah Poac Management Model In Guidance And Counseling Services : A Systematic Review Of Implementation Effectiveness In Schools. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 771–783.
- Muslimah, A. (2021). Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif. *Pincis : Palangka Raya International And National Conference On Islamic Studuis*, 1(1), 173–186.
- Pratama, R. Y., Jenderal, U., & Yani, A. (N.D.). *Fungsi-Fungsi Manajemen*.
- Radyan, D. O., Amelia, N. A., Yudha, P., & Fatur, R. (2021). Penguatan Kapasitas Kelembagaan Dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (Jiap)*, 7(2), 200–209.
- Rakmadi, R., & Suryandari, K. A. (2025). Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Di Desa Sukadadi Kabupaten Pesawaran. *Journal Terekam Jejak (Jtj)*, 3(3), 111–120.
- Susanti. (2024). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades). *Jurnal Embistek Ekonomi, Manajemen Bisnis, Syariah, Dan Teknologi*, 3(2), 383–390.
- Syamsuddin, A. P., Mursak, S., Pt, S. P., & Semesta, G. K. (2024). *Model Pemerintahan Desa Berkelanjutan*.
- Tamu, D., Hatu, R. A., & Hatu, D. R. R. (2025). Kontribusi Masyarakat Terhadap Efektivitas Program Pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah (Bumd) Di Kabupaten Pohuwato Community Contributions To The Effectiveness Of Regional-Owned Enterprise (Bumd) Empowerment Programs In Pohuwato Regency. *Sosiologi Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 39–47.
- Winarno, Y., Gustaman, F. A., & Artikel, I. (2025). *Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Maju Lancar Untuk Menyediakan Air Minum Yang Sehat Untuk Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Desa Ngawenombo Yohanes Winarno, Fulia Aji Gustaman*. 14(1), 58–69.
- Yuliani, W. (2018). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling. *Quanta*, 2(2), 83–91. <https://doi.org/10.22460/Q.V1i1p1-10.497>